



**BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 01.a TAHUN 2015**

T E N T A N G

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah perlu diatur pedoman tentang Standar Biaya Masukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA – SKPD adalah dokumen rencana kerja keuangan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
4. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
5. Harga Satuan Biaya Masukan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk menghitung biaya komponen masukan kegiatan.
6. Tarif Biaya Masukan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

7. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 berfungsi sebagai acuan bagi SKPD untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA – SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2015;
- (2) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang besaran biaya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA – SKPD Tahun Anggaran 2015;
- (3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 berfungsi sebagai :
 - a. Batas tertinggi; atau
 - b. Estimasi.
- (4) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui;
- (5) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Selain Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati dapat menetapkan Standar Biaya Masukan lainnya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kekhususan standar biaya yang dimiliki oleh SKPD;
- b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu; dan atau
- c. Daerah terpencil/Daerah perbatasan/Pulau terluar.

BAB III
PENUTUP

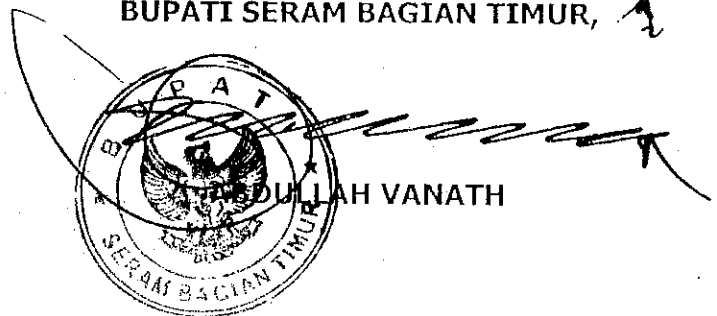
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

ditetapkan di Bula
pada tanggal 05 Januari 2015

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,



diundangkan di Bula
pada tanggal 05 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

DR. SYARIF MAKMUR, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2015 NOMOR : 01.a

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR : 01.a TAHUN 2015

TANGGAL : 05 JANUARI 2015

TENTANG : STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015

A BELANJA PEGAWAI

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA T.A. 2013	KET
1	2	3	4	5
1	HONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1.1. PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN			
	a. Nilai pagu dana sd Rp. 100 juta	OB	300,000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd 250 juta	OB	410,000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd 500 juta	OB	520,000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd 1 milyar	OB	630,000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar sd 2,5 milyar	OB	770,000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 milyar sd 5 milyar	OB	811,000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar sd 10 milyar	OB	1,050,000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 milyar	OB	1,380,000	
	1.2. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
	a. Nilai pagu dana sd Rp. 100 juta	OB	220,000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd 250 juta	OB	310,000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd 500 juta	OB	410,000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd 1 milyar	OB	500,000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar sd 2,5 milyar	OB	620,000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 milyar sd 5 milyar	OB	730,000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar sd 10 milyar	OB	850,000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 milyar	OB	1,130,000	
	1.3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN			
	a. Nilai pagu dana sd Rp. 100 juta	OB	220,000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd 250 juta	OB	310,000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd 500 juta	OB	410,000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd 1 milyar	OB	500,000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar sd 2,5 milyar	OB	620,000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 milyar sd 5 milyar	OB	730,000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar sd 10 milyar	OB	850,000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 milyar	OB	1,130,000	
	1.4. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN			
	a. Nilai pagu dana sd Rp. 100 juta	OB	220,000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd 250 juta	OB	310,000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd 500 juta	OB	410,000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd 1 milyar	OB	500,000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar sd 2,5 milyar	OB	620,000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 milyar sd 5 milyar	OB	730,000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar sd 10 milyar	OB	850,000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 milyar	OB	1,130,000	
	1.5. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN			
	a. Nilai pagu dana sd Rp. 100 juta	OB	200,000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd 250 juta	OB	280,000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd 500 juta	OB	370,000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd 1 milyar	OB	460,000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar sd 2,5 milyar	OB	570,000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 milyar sd 5 milyar	OB	680,000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar sd 10 milyar	OB	790,000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 milyar	OB	1,050,000	

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA T.A. 2013	KET
1	2	3	4	5
	1.6. BENDAHARA PENGELUARAN			
	a. Nilai pagu dana sd Rp. 100 juta	OB	140,000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd 250 juta	OB	220,000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd 500 juta	OB	300,000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd 1 milyar	OB	370,000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar sd 2,5 milyar	OB	470,000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 milyar sd 5 milyar	OB	570,000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar sd 10 milyar	OB	660,000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 milyar	OB	890,000	
	1.7. BENDAHARA PENERIMAAN			
	a. Nilai pagu dana sd Rp. 100 juta	OB	140,000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd 250 juta	OB	210,000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd 500 juta	OB	280,000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd 1 milyar	OB	350,000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar sd 2,5 milyar	OB	420,000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 milyar sd 5 milyar	OB	490,000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar sd 10 milyar	OB	560,000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 milyar	OB	630,000	
	1.8. STAF PENGELOLA/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)			
	a. Nilai pagu dana sd Rp. 100 juta	OB	60,000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd 250 juta	OB	110,000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd 500 juta	OB	170,000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd 1 milyar	OB	230,000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar sd 2,5 milyar	OB	300,000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 milyar sd 5 milyar	OB	370,000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar sd 10 milyar	OB	440,000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 milyar	OB	610,000	
2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
	2.1. PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA			
	2.2. PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)			
	a. Nilai pagu pengadaan sd Rp. 200 juta	Per Paket	480,000	
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta sd 500 juta	OP	650,000	
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta sd 1 milyar	OP	820,000	
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 milyar sd 2.5 milyar	OP	1,020,000	
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2.5 milyar sd 5 milyar	OP	1,320,000	
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 milyar sd 10 milyar	OP	1,580,000	
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 milyar	OP	1,912,000	
	2.3. PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA LAYANAN PENGADAAN (ULP)			
	a. Nilai pagu pengadaan sd Rp. 200 juta	Per Paket	460,000	
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta sd 500 juta	OP	560,000	
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta sd 1 milyar	OP	620,000	
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 milyar sd 2.5 milyar	OP	840,000	
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2.5 milyar sd 5 milyar	OP	1,070,000	
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 milyar sd 10 milyar	OP	1,300,000	
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 milyar	OP	1,610,000	

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA T.A. 2013	KET
1	2	3	4	5
	2.4. PANITA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)			
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sd Rp. 50 juta	Per Paket	250,000	
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi diatas Rp. 200 juta sd 500 juta	OP	250,000	
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp. 100 juta	Per Paket	250,000	
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OP	280,000	
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	400,000	
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar.	OP	520,000	
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2.5 milyar.	OP	710,000	
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 2.5 milyar s.d. Rp. 5 milyar.	OP	800,000	
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar.	OP	1,070,000	
3	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN			
	3.1. PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA	OB	220,000	
	3.2. PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA			
	a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sd Rp. 200 juta	OP	220,000	
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 200 juta sd 500 juta	OP	320,000	
	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 500 juta sd 1 milyar	OP	420,000	
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 1 milyar sd 2.5 milyar	OP	570,000	
	e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 2.5 milyar sd 5 milyar	OP	710,000	
	f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 5 milyar sd 10 milyar	OP	860,000	
	g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 10 milyar	OP	1,060,000	
4	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)			
	4.1. UNIT AKUNTANSI TINGKAT SATUAN KERJA (UAKPA/BAANG) YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SK KEPALA SKPD			
	a. Penanggungjawab	OB	300,000	
	b. Koordinator	OB	250,000	
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	200,000	
	d. Anggota/Petugas	OB	150,000	
5	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH			
	5.1. TINGKAT PENGGUNA BARANG	OB	400,000	
	5.2. TINGKAT KUASA PENGGUNA BARANG	OB	300,000	
6	HONORARIUM KELEBIHAN JAM PENELITIAN/PEREKAYASAAN			
	6.1. PENELITI/PEREKAYASA UTAMA	OJ	60,000	
	6.2. PENELITI/PEREKAYASA MADYA	OJ	50,000	
	6.3. PENELITI/PEREKAYASA MUDA	OJ	40,000	
	6.4. PENELITI/PEREKAYASA PRATAMA	OJ	35,000	

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA T.A. 2013	KET
1	2	3	4	5
7	HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PERKAYASAAN			
	7.1. PEMBANTU PENELITI/PEREKAYASA	OJ	60,000	
	7.2. KOORDINATOR PENELITI/PEREKAYASA	OB	50,000	
	7.3. SEKRETARIAT PANITIA/PEREKAYASA	OB	40,000	
	7.4. PENGOLAH DATA	Peneletian/ Perekayasaan	35,000	
	7.5. PETUGAS SURVEY	Orang/Responden	8,000	
	7.6. PEMBANTU LAPANGAN	OH	80,000	
8	HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/ DESIMINASI/FGD/KEGIATAN SEJENIS			
	8.1. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHASA			
	a. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	800,000	
	b. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	700,000	
	c. Pejabat Eselon III / yang disetarakan	OJ	500,000	
	8.2. HONORARIUM MODERATOR	OJ	350,000	
9	HONORARIUM PANITIA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/ DISEMINASI/FGD/KEGIATAN SEJENIS			
	9.1. PENANGGUNGJAWAB	OK	350,000	
	9.2. KETUA/WAKIL KETUA	OK	300,000	
	9.3. SEKRETARIS	OK	200,000	
	9.4. ANGGOTA	OK	200,000	
10	HONORARIUM ROHANIWAN			
	10.1. ROHANIWAN	OK	300,000	
	10.2. ROHANIWAN SUMPAAH	OK	300,000	
	10.3. ROHANIWAN PEMBIMBING IBADAH HAJI	OK	4,500,000	
	10.4. ROHANIWAN PELAYANAN AGAMA	Orng/Triwulan	600,000	
11	HONORARIUM TENAGA IT, OPERATOR KOMPUTER, SATPAM, PENGEMUDI PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI			
	11.1 TENAGA IT	OB	1,800,000	
	11.2 TENAGA KOMPUTER	OB	1,600,000	
	11.3. TENAGA TEKNIS LAINNYA	OB	1,400,000	
	11.4. SATPAM DAN PENGEMUDI	OB	1,500,000	
	11.5. PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN	OB	1,100,000	
	11.6. PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI	OB	1,500,000	
12	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN			
	12.1 YANG DITETAPKAN OLEH PA / KPA			
	a. Pengarah	OB	450,000	
	b. Penanggungjawab	OB	350,000	
	c. Koordinator/Ketua	OB	300,000	
	d. Wakil Ketua	OB	250,000	
	e. Sekretaris	OB	200,000	
	f. Anggota	OB	200,000	
	12.2. HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	200,000	
	b. Anggota	OB	180,000	

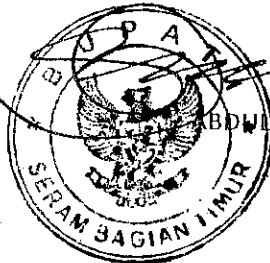
NO	URAIAN	SATUAN	HARGA T.A. 2013	KET
1	2	3	4	5
13	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL			
	13.1. PENANGGUNGJAWAB	Oter	450,000	
	13.2. REDAKTUR	Oter	350,000	
	13.3. PENYUNTING/EDITOR	Oter	275,000	
	13.4. DESAIN GRAFIS/FOTOGRAFER	Oter	180,000	
	13.5. SEKRETARIAT	Oter	150,000	
	13.6. PEMBUAT ARTIKEL	Halaman	150,000	
14	HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN/MAJALAH/SAMBUTAN/PIDATO/ NASKAH			
	14.1. PENANGGUNGJAWAB	Oter	400,000	
	14.2. REDAKTUR	Oter	300,000	
	14.3. PENYUNTING/EDITOR	Oter	250,000	
	14.4. DESAIN GRAFIS/FOTOGRAFER	Oter	180,000	
	14.5. SEKRETARIAT	Oter	150,000	
	14.6. PEMBUAT ARTIKEL	Halaman	100,000	
	14.7. PEMBUAT SAMBUTAN/PIDATO/NASKAH	Per Naskah	200,000	
15	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE			
	15.1. PENANGGUNGJAWAB	Oter	400,000	
	15.2. REDAKTOR	Oter	350,000	
	15.3. EDITOR	Oter	300,000	
	15.4. WEB ADMIN	Oter	250,000	
	15.5. WEB DEVELOPER	Oter	200,000	
	15.6. PEMBUAT ARTIKEL	Halaman	50,000	
	15.7. PENERJEMAH	1500 Karakter	50,000	
16	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG MENGELOLA BELANJA PEGAWAI			
	16.1. ATASAN LANGSUNG PEMEGANG KAS/PA/KPA			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 25 miliar	OB	350,000	
	b. Nilai pagu dana diatas RP. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	460,000	
	c. Nilai pagu dana diatas RP. 50 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	580,000	
	d. Nilai pagu dana diatas RP. 100 miliar s.d. Rp. 200 miliar	OB	690,000	
	16.2. PEMEGANG KAS/BENDAHARA			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 25 miliar	OB	250,000	
	b. Nilai pagu dana diatas RP. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	330,000	
	c. Nilai pagu dana diatas RP. 50 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	410,000	
	d. Nilai pagu dana diatas RP. 100 miliar s.d. Rp. 200 miliar	OB	490,000	
	16.3. JURU BAYAR/STAF			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 25 miliar	OB	200,000	
	b. Nilai pagu dana diatas RP. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	270,000	
	c. Nilai pagu dana diatas RP. 50 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	340,000	
	d. Nilai pagu dana diatas RP. 100 miliar s.d. Rp. 200 miliar	OB	410,000	
27	VAKASI DAN HONOR PENYELENGGARAAN UJIAN			
	17.1. VAKASI			
	a. Pendidikan Dasar pemeriksa hasil ujian	siswa/mata ujian	3,000	
	b. Pendidikan menengah pemeriksa hasil ujian	siswa/mata ujian	4,500	
	c. Pendidikan tinggi pemeriksa hasil ujian	mahasiswa/mata ujian	10,000	
	d. Penguji tugas akhir/skripsi/tesis	orang/mahasiswa	150,000	

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA T.A. 2013	KET
1	2	3	4	5
28	SATUAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN/INTENSIF DOKTER & PARAMEDIS			
	18.1. DOKTER SPESIALIS PEGAWAI NEGERI SIPIL	OB	26,000,000	
	18.2. DOKTER UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL	OB	7,100,000	
	18.3. DOKTER UMUM PEGAWAI TIDAK TETAP	OB	7,000,000	
	18.4. DOKTER UMUM PTT	OB	1,600,000	
	18.5. PENATA ANASTESI PTT	OB	7,100,000	
	18.6. PARAMEDIS PELAYANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	OB	425,000	
	18.7. PARAMEDIS PELAYANAN PTT	OB	750,000	
	18.8. PARAMEDIS ADMINISTRASI PNS	OB	450,000	
	18.9. PARAMEDIS ADMINISTRASI PTT	OB	550,000	
19	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR			
	19.1. UANG LEMBUR			
	a. Golongan I	OJ	10,000	
	b. Golongan II	OJ	13,000	
	c. Golongan III	OJ	17,000	
	d. Golongan IV	OJ	20,000	
	19.2. UANG MAKAN LEMBUR			
	a. Golongan I dan II	OJ	15,000	
	b. Golongan III	OJ	17,500	
	c. Golongan IV	OJ	20,000	
20	SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT	orang/kali	100,000	
21	SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH			
	21.1. BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG	M ³	100,000	
22	BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH			
	22.1. BUPATI		5,000,000	
	22.2. WAKIL BUPATI		5,000,000	
	22.3. KETUA DPRD		5,000,000	
	22.4. WAKIL KETUA DPRD		5,000,000	
	22.5. SEKRETARIS DAERAH		4,500,000	
	22.6. ANGGOTA DPRD		4,500,000	
	22.7. ESELON II		3,500,000	
	22.8. ESELON III / GOLONGAN IV		3,000,000	
	22.9. ESELON IV / GOLONGAN III		2,500,000	
	22.10. GOLONGAN II/I		2,000,000	
23	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS			
	23.1. DALAM DAERAH			
	a. Kecamatan Bula	OH	150,000	
	b. Kecamatan Bula Barat	OH	150,000	
	c. Kecamatan Teluk Waru	OH	150,000	
	d. Kecamatan Tutuk Tolu	OH	150,000	
	e. Kecamatan Kian Darat	OH	150,000	
	f. Kecamatan Lian Vitu	OH	150,000	
	g. Kecamatan Seram Timur	OH	150,000	
	h. Kecamatan Kilmuri	OH	150,000	
	i. Kecamatan Werinama	OH	150,000	
	j. Kecamatan Siwalalat	OH	150,000	
	k. Kecamatan Pulau Panjang	OH	150,000	
	l. Kecamatan Pulau Gorom	OH	150,000	

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA T.A. 2013	KET
1	2	3	4	5
	m. Kecamatan Gorom Timur	OH	150,000	
	n. Kecamatan Wakate	OH	150,000	
	o. Kecamatan Teor	OH	150,000	
	23.2. LUAR DAERAH DALAM PROVINSI			
	a. Ambon	OH	380,000	
	b. Maluku Tengah	OH	380,000	
	c. Seram Bagian Barat	OH	380,000	
	d. Buru	OH	380,000	
	e. Buru Selatan	OH	380,000	
	f. Kota Tual	OH	380,000	
	g. Maluku Tenggara	OH	380,000	
	h. Maluku Tenggara Barat	OH	380,000	
	i. Kepulauan aru	OH	380,000	
	j. Maluku Barat Daya	OH	380,000	
	23.3. LUAR PROVINSI			
	1. Aceh	OH	360,000	
	2. Sumatra Utara	OH	370,000	
	3. Riau	OH	370,000	
	4. Kepulauan Riau	OH	370,000	
	5. Jambi	OH	370,000	
	6. Sumatra Barat	OH	380,000	
	7. Sumatra Selatan	OH	380,000	
	8. Lampung	OH	380,000	
	9. Bengkulu	OH	380,000	
	10. Bangka Belitung	OH	410,000	
	11. Banten	OH	370,000	
	12. Jawa Barat	OH	430,000	
	13. DKI Jakarta	OH	530,000	
	14. Jawa Tengah	OH	370,000	
	15. D. I. Yogyakarta	OH	420,000	
	16. Jawa Timur	OH	410,000	
	17. Bali	OH	480,000	
	18. Nusa Tenggara Barat	OH	440,000	
	19. Nusa Tenggara Timur	OH	430,000	
	20. Kalimantan Barat	OH	380,000	
	21. Kalimantan Tengah	OH	360,000	
	22. Kalimantan Timur	OH	430,000	
	23. Kalimantan Selatan	OH	380,000	
	24. Kalimantan Utara	OH	430,000	
	25. Sulawesi Utara	OH	370,000	
	26. Gorontalo	OH	370,000	
	27. Sulawesi Barat	OH	410,000	
	28. Sulawesi Selatan	OH	430,000	
	29. Sulawesi Tengah	OH	370,000	
	30. Sulawesi Tenggara	OH	380,000	
	31. Maluku Utara	OH	430,000	
	32. Papua	OH	580,000	
	33. Papua Barat	OH	480,000	
	34. Maluku	OH	380,000	

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA T.A. 2013	KET
1	2	3	4	5
24	UANG REPRESENTASI			
	24.1. DALAM DAERAH			
	a. Bupati	OH	1,500,000	
	b. Wakil Bupati	OH	1,000,000	
	c. Ketua DPRD	OH	100,000	
	d. Wakil Ketua DPRD	OH	750,000	
	e. Sekretaris Daerah	OH	750,000	
	f. Anggota DPRD	OH	600,000	
	g. Eselon II	OH	600,000	
	24.2. LUAR DAERAH DALAM PROVINSI			
	a. Bupati	OH	2,500,000	
	b. Wakil Bupati	OH	1,500,000	
	c. Ketua DPRD	OH	1,500,000	
	d. Wakil Ketua DPRD	OH	1,250,000	
	e. Sekretaris Daerah	OH	1,250,000	
	f. Anggota DPRD	OH	900,000	
	g. Eselon II	OH	900,000	
	24.3. LUAR PROVINSI			
	a. Bupati	OH	3,000,000	
	b. Wakil Bupati	OH	2,000,000	
	c. Ketua DPRD	OH	2,000,000	
	d. Wakil Ketua DPRD	OH	1,500,000	
	e. Sekretaris Daerah	OH	1,500,000	
	f. Anggota DPRD	OH	1,200,000	
	g. Eselon II	OH	1,200,000	

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

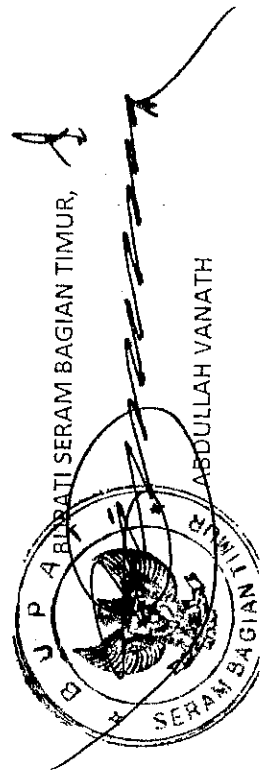


ABDULLAH VANATH

25. SATUAN BIAYA PENGINAPAN

NO	TUJUAN KECAMATAN / DAERAH / PROVINSI	BUPAT	WAKIL BUPATI	KETUA DPRD	WAKIL KETUA DPRD	SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPRD	ESELON II	ESELON III/ GOLONGAN IV	ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN II/I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.1	DALAM DAEAH										
1	Kecamatan Bula	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	150,000	150,000	150,000
2	Kecamatan Bula Barat	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	150,000	150,000	150,000
3	Kecamatan Teluk Waru	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	150,000	150,000	150,000
4	Kecamatan Tutuk Tolu	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	150,000	150,000	150,000
5	Kecamatan Kian Darat	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	150,000	150,000	150,000
6	Kecamatan Lina Vitu	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	150,000	150,000	150,000
7	Kecamatan Seram Timur	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	150,000	150,000	150,000
8	Kecamatan Kilimuri	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	150,000	150,000	150,000
9	Kecamatan Werinama	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	150,000	150,000	150,000
10	Kecamatan Siwalalat	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	150,000	150,000	150,000
11	Kecamatan Pulau Panjang	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	150,000	150,000	150,000
12	Kecamatan Pulau Gorom	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	150,000	150,000	150,000
13	Kecamatan Gorom Timur	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	150,000	150,000	150,000
14	Kecamatan Wakate	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	150,000	150,000	150,000
15	Kecamatan Teor	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	150,000	150,000	150,000
25.2	LUAR DAERAH DALAM PROVISI										
1	Ambon	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	680,000	545,000	414,000
2	Maluku Tengah	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	680,000	545,000	414,000
3	Seram Bagian Barat	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	680,000	545,000	414,000
4	Buru	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	680,000	545,000	414,000
5	Buru Selatan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	680,000	545,000	414,000
6	Kota Tual	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	680,000	545,000	414,000
7	Maluku Tenggara	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	680,000	545,000	414,000
8	Maluku Tenggara Barat	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	680,000	545,000	414,000
9	Kepulauan aru	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	680,000	545,000	414,000
10	Maluku Barat Daya	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	680,000	545,000	414,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.3	LUAR PROVINSI										
1	Aceh	1,425,000	1,025,000	1,025,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
2	Sumatra Utara	1,520,000	1,120,000	1,120,000	850,000	850,000	650,000	650,000	480,000	400,000	400,000
3	Riau	1,425,000	1,025,000	1,025,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
4	Kepulauan Riau	1,720,000	1,320,000	1,320,000	930,000	930,000	850,000	850,000	650,000	400,000	400,000
5	Jambi	1,425,000	1,025,000	1,025,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
6	Sumatra Barat	1,425,000	1,025,000	1,025,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
7	Sumatra Selatan	1,425,000	1,025,000	1,025,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
8	Lampung	1,425,000	1,025,000	1,025,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
9	Bengkulu	1,425,000	1,025,000	1,025,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
10	Bangka Belitung	1,425,000	1,025,000	1,025,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
11	Banten	1,520,000	1,120,000	1,120,000	850,000	850,000	650,000	650,000	480,000	400,000	400,000
12	Jawa Barat	1,520,000	1,120,000	1,120,000	850,000	850,000	650,000	650,000	480,000	400,000	400,000
13	DKI Jakarta	1,870,000	1,425,000	1,425,000	1,000,000	1,000,000	800,000	800,000	650,000	400,000	400,000
14	Jawa Tengah	1,520,000	1,120,000	1,120,000	850,000	850,000	650,000	650,000	480,000	400,000	400,000
15	D. I. Yogyakarta	1,520,000	1,120,000	1,120,000	850,000	850,000	650,000	650,000	480,000	400,000	400,000
16	Jawa Timur	1,520,000	1,120,000	1,120,000	850,000	850,000	650,000	650,000	480,000	400,000	400,000
17	Bali	2,870,000	2,425,000	2,425,000	1,800,000	1,800,000	1,200,000	1,200,000	900,000	854,000	658,000
18	Nusa Tenggara Barat	1,425,000	1,120,000	1,120,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
19	Nusa Tenggara Timur	1,425,000	1,120,000	1,120,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
20	Kalimantan Barat	1,425,000	1,120,000	1,120,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
21	Kalimantan Tengah	1,425,000	1,120,000	1,120,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
22	Kalimantan Timur	1,425,000	1,120,000	1,120,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
23	Kalimantan Selatan	1,425,000	1,120,000	1,120,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
24	Kalimantan Utara	1,425,000	1,120,000	1,120,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
25	Sulawesi Utara	1,425,000	1,120,000	1,120,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
26	Gorontalo	1,425,000	1,120,000	1,120,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
27	Sulawesi Barat	1,425,000	1,120,000	1,120,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
28	Sulawesi Selatan	1,720,000	1,320,000	1,320,000	1,135,000	1,135,000	925,000	925,000	650,000	610,000	400,000
29	Sulawesi Tengah	1,425,000	1,025,000	1,025,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
30	Sulawesi Tenggara	1,425,000	1,025,000	1,025,000	800,000	800,000	600,000	600,000	450,000	400,000	400,000
31	Maluku Utara	1,200,000	900,000	900,000	700,000	700,000	500,000	500,000	400,000	300,000	280,000
32	Papua	197,000	1,425,000	1,425,000	970,000	970,000	750,000	750,000	500,000	400,000	400,000
33	Papua Barat	1,870,000	1,425,000	1,425,000	970,000	970,000	750,000	750,000	500,000	400,000	400,000
34	Maluku	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	680,000	545,000	414,000



PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Pengelola keuangan/kegiatan pada setiap satuan kerja, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan keuangan pada masing-masing SKPD;
- b. Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan mempertimbangkan besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lain;
- d. PA / KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka honorarium hanya boleh mengambil salah satu antara honorarium sebagai PA / KPA atau PPK;
- e. Untuk membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pelaksanaan kegiatan, Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menunjuk staf administrasi kegiatan;
- f. Honorarium pengelola keuangan/kegiatan, dibayar sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan maksimal 9 (sembilan) bulan dikecualikan untuk Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan selama 12 (dua belas) bulan.

2. Honorarium Pengadaan Barang / Jasa

- a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan per paket pekerjaan.
- b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang / Jasa / ULP
Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa. Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa diberikan per paket pekerjaan.

Catatan :

Dalam hal Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Anggota Kelompok Kerja ULP telah ditetapkan dalam jabatan fungsional dan telah diberikan tunjangan jabatan fungsionalnya, maka pemberian honorarium kepada Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Anggota Kelompok Kerja ULP dinyatakan tidak berlaku.

3. Honorarium Penerimaan Hasil Pekerjaan

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.

4. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Honorarium diberikan kepada Tim Pengelola yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada SKPD sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Daerah.

Ketentuan mengenai pengelola SAI adalah

- a) Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati;
- b) Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD.

5. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah

Honorarium pengurus/penyimpan barang milik daerah diberikan kepada pejabat/pegawai dilingkungan pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan pengguna barang. Jumlah pejabat/pegawai yang diberikan honorarium selaku pengurus/pengguna barang milik daerah paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat pengguna barang dan paling banyak 2 (dua) orang pada tingkat kuasa pengguna barang.

6. Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasa

Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri adalah atas kelebihan jam kerja normal atau diluar jam kerja paling banyak 4 (empat) jam sehari. Dalam hal peneliti mendapat honorarium, peneliti tidak berhak mendapatkan uang lembur.

7. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasa

Honorarium peneliti diberikan kepada pegawai negeri dan non pegawai negeri yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang diberi tugas untuk melakukan penelitian.

8. Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/FGD/Kegiatan Sejenis.

8.1 Honorarium Narasumber

Honorarium narasumber diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat.

Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan dengan ketentuan :

- a) Berasal dari luar SKPD penyelenggara;
- b) Berasal dari SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara atau berkenaan dengan masyarakat.
- c) Apabila menjadi tim panitia merangkap narasumber maka honorarium diberikan salah satu.

Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber.

8.2 Honorarium Moderator

Honorarium Moderator diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar / rakor / sosialisasi / diseminasi/*focus group discussion*/kegiatan sejenis. Pelaksanaan kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/*focus group discussion*/kegiatan sejenis dapat menggunakan jasa moderator dalam hal diperlukan.

9. Honorarium Panitia Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/FGD/Kegiatan Sejenis

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri / non pegawai negeri yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar / sosialisasi / diseminasi / diklat / bimtek / sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup penyelenggara.

Jumlah personil kepanitiaan dengan ketentuan :

- a) Untuk seminar/sosialisasi/diseminasi maksimal 20% (dua puluh) dari jumlah peserta.
- b) Untuk bimtek dan diklat maksimal 9 (sembilan) orang.

10. Honorarium Rohaniawan

Honorarium Rohaniawan diberikan kepada :

1. Pegawai negeri/non pegawai negeri yang ditugaskan sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan dan do'a. Honorarium sudah termasuk uang transport bagi rohaniawan.
2. Pegawai negeri/non pegawai negeri yang diberi tugas sebagai pengelola/penyelenggara ibadah, yang besaran dari jumlah personil ditetapkan dengan keputusan Bupati.

11. Honorarium Tenaga IT, Operator Komputer, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti.

Pemberian honorarium dapat diberikan bagi tenaga IT, Operator Komputer, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti sampai dengan 12 bulan dengan ketentuan telah bekerja pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur. Kepala SKPD tidak diperkenankan untuk menambah atau mengangkat pegawai tidak tetap yang dipekerjakan pada SKPD.

Satuan biaya honorarium diperuntukan bagi non-pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari satuan biaya. Besaran honorarium tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.

12. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non-pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati/Kepala SKPD/PA/KPA.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a) Tim pelaksana dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b) Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- c) Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan satuan kerja lainnya;
- d) Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau diluar jam kerja;
- e) Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari;
- f) Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisiensi.

2. Honorarium Sekretariat Pelaksana Kegiatan

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan Kepala SKPD/PA/KPA. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang.

13. Honorarium Tim Penyusun Jurnal

Honorarium tim penyusun jurnal dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri

14. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah

Honorarium tim penyusun bulletin/majalah dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan bulletin/majalah, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalis, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

15. Honorarium Tim Pengelola Website

Honorarium Tim Pengelola Website dapat diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang diberikan tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Website Kabupaten yang dimaksud disini adalah yang dikelola Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dan Website SKPD yang dikelola masing-masing SKPD.

Pengelola Website dapat diberikan honorarium dengan ketentuan :

- a) Maksimal 9 (sembilan) bulan;
- b) Data/berita harus selalu di update.

Tim pengelola berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

16. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pada Satker Yang Mengelola Belanja Pegawai

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada satuan kerja yang khusus mengelola belanja pegawai dapat diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada SKPD sesuai Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

17. Vakasi dan Honor Penyelenggara Ujian

Vakasi adalah uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi. Pada pendidikan tingkat dasar dan menengah, vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sedangkan untuk pendidikan tingkat tinggi, vakasi dapat diberikan untuk ujian masuk, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir. Honorarium penyelenggara Ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi. Satuan biaya pengawas sudah termasuk uang transport.

18. Satuan Tunjangan Kesejahteraan/Insentif Dokter dan Paramedis

Tunjangan/insentif Dokter diperuntukan kepada Pegawai Negeri Sipil maupun pegawai tidak tetap yang berstatus sebagai dokter dan paramedis dan bertugas di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur

19. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan

- a. Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai negeri yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- b. Uang makan lembur diperuntukan bagi semua pegawai dan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

20. Satuan Biaya Uang Saku Rapat

Uang saku rapat di kantor merupakan kompensasi bagi pegawai negeri/non pegawai negeri yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor sebagai pengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor. Uang saku rapat didalam kantor dapat dibayarkan sepanjang :

- a. Melibatkan peserta dari masyarakat;
- b. Dilaksanakan minimal 4 jam, di luar jam kerja;
- c. Tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;
- d. Dilengkapi dengan surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II/Kepala Satuan Kerja;
- e. Surat tugas bagi peserta dari unit penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II/Kepala Satuan Kerja; dan
- f. Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan (pejabat minimal setingkat eselon III/kepala satuan kerja/kepala bidang).

Satuan biaya uang saku rapat belum termasuk konsumsi rapat.

21. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah

Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat Negara/pegawai negeri yang dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

22. Biaya Pemetaan dan Angkutan Jenazah

Biaya pemetaan dan angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya rill dan merupakan batas tertinggi.

23. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas. Uang harian perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.


24. Uang Representasi

Uang representasi adalah uang saku kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II. Uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

25. Satuan Biaya Penginapan

Satuan biaya penginapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan sesuai dengan peruntukannya. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah dan dibayarkan secara lumpsum.

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,


ABDULLAH VANATH



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
 NOMOR : 01.a TAHUN 2015
 TANGGAL : 05 JANUARI 2015
 TENTANG : STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015


STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	SATUAN TRANSPORR KEGIATAN DALAM KOTA KABUPATEN/ KECAMATAN	Orang/Kali	50,000	
2	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL			
	2.1. Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/Angkatan	30,261,000	
	2.2. Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/Angkatan	22,125,000	
	2.3. Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/Angkatan	20,230,000	
3	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN			
	3.1. Golongan I dan Golongan II	Peserta/Angkatan	4,470,000	
	3.2. Golongan III	Peserta/Angkatan	5.545,000	
4	SATUAN BIAYA KONTRIBUSI BIMBINGAN TEKNIS, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR			
	4.1. Golongan IV	Peserta/Angkatan	5,000,000	
	4.2. Golongan III	Peserta/Angkatan	5,000,000	
	4.3. Golongan II	Peserta/Angkatan	5,000,000	
	4.4. Golongan I	Peserta/Angkatan	5,000,000	
5	SATUAN BIAYA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR			
	5.1. Kendaraan Bupati	Unit/Tahun	22,450,000	
	5.2. Kendaraan Wakil Bupati	Unit/Tahun	22,260,000	
	5.3. Kendaraan Ketua DPRD	Unit/Tahun	22,260,000	
	5.4. Kendaraan Wakil Ketua DPRD	Unit/Tahun	20,350,000	
	5.5. Kendaraan Sekretaris Daerah	Unit/Tahun	20,350,000	
	5.6. Kendaraan Staf Ahli	Unit/Tahun	12,720,000	
	5.7. Kendaraan Asisten Sekretaris Daerah	Unit/Tahun	12,720,000	
	5.8. Kendaraan Kepala SKPD/Kepala Bagian Sekretariat Daerah	Unit/Tahun	12,720,000	
	5.9. Kendaraan Operasional Roda (Empat)	Unit/Tahun	14,740,000	
	5.10. Kendaraan Operasional Lapangan (<i>double gardan</i>)	Unit/Tahun	16,540,000	
	5.11. Kendaraan Roda 4 (empat) Patroli Jalan Raya	Unit/Tahun	16,540,000	
	5.12. Kendaraan Roda 6 (enam)	Unit/Tahun	12,340,000	
	5.13. Kendaraan Laut (<i>speed board</i>)	Unit/Tahun	19,340,000	
6	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR			
	6.1. Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	70,000	
	6.2. Meja, Kursi dan Lemari Kantor	Unit/Tahun	100,000	
	6.3. Personal Komputer/Notebook	Unit/Tahun	630,000	
	6.4. Printer	Unit/Tahun	600,000	
	6.5. AC Split	Unit/Tahun	530,000	
	6.6. Mesin Ketik	Unit/Tahun	500,000	
	6.7. Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	6,250,000	
	6.8. Genset 75 KVA	Unit/Tahun	7,500,000	
	6.9. Genset 100 KVA	Unit/Tahun	8,820,000	
	6.10. Genset 125 KVA	Unit/Tahun	9,360,000	
	6.11. Genset 150 KVA	Unit/Tahun	11,520,000	
	6.12. Genset 175 KVA	Unit/Tahun	12,860,000	
	6.13. Genset 200 KVA	Unit/Tahun	13,770,000	
	6.14. Genset 250 KVA	Unit/Tahun	14,580,000	
	6.15. Genset 275 KVA	Unit/Tahun	15,430,000	
	6.16. Genset 300 KVA	Unit/Tahun	18,200,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	6.17. Genset 350 KVA	Unit/Tahun	19,940,000	
	6.18. Genset 450 KVA	Unit/Tahun	22,250,000	
	6.19. Genset 500 KVA	Unit/Tahun	27,500,000	
7	SATUAN BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON-GELAR			
	7.1. Program Diploma I, III dan dan Diploma IV/Strata 1			
	a. Biaya Pendidikan Dokter Umum/Reguler			
	- Dokter Umum (2 Semester)	OT	7,500,000	
	- Biaya Buku, Alat Kedokteran, Pepemitraan & Penguji	OT	60,000,000	
	b. Biaya Pendidikan STPDN			
	- Biaya Psikotes	OT	750,000	
	- Biaya Tes Kesehatan Laki- Laki	OT	2,100,000	
	- Biaya Tes Kesehatan Perempuan	OT	2,200,000	
	- Tugas Pelajar Praja IPDN Lanjutan	OT	10,000,000	
	c. Biaya Persiapan Ujian Akhir dan Wisuda S1			
	- Biaya Skripsi (30 org)	OT	1,500,000	
	- Biaya Buku (30 org)	OT	750,000	
	d. Uang Kuliah Reguler			
	- Uang Semester VI dan VII di IKOPIN)	OS	1,440,000	
	- Uang Semester VI dan VII di CIPUTRA)	OS	22,000,000	
	- Uang Nginap Mahasiswa IKOPIN	OB	500,000	
	- Uang Nginap Mahasiswa CIPUTRA	OT	40,000,000	
	- Biaya Makan Mahasiswa IKOPIN	OB	1,200,000	
	- Biaya Makan Mahasiswa CIPUTRA	OB	1,500,000	
	- Uang Buku & Praktek Mahasiswa CIPUTRA	OT	4,000,000	
	- Uang Ektrakulikuler	OT	700,000	
	e. Biaya Kuliah Perbaikan			
	- Biaya Register	OT	250,000	
	- Biaya Kuliah (SKS)	OT	150,000	
	7.2. Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2			
	a. Biaya Tugas Belajar S2			
	- Biaya Pendidikan Dokter Spesial (2 semester)	OT	100,000,000	
8	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN			
	8.1. Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit			
	a. Kelas I	OH	36,000	
	b. Kelas II	OH	36,000	
	c. Kelas III	OH	36,000	
	d. VIP	OH	36,000	
9	SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN			
	9.1. Memiliki Sampai dengan 40 Pegawai	Satker/Tahun	61,000,000	
	9.2. Memiliki Lebih dari 40 Pegawai	OT	1,525,000	
10	SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN			
	10.1. Makanan dan Minuman Tamu			
	a. Makanan dan Minuman Tamu Bupati	Orang/Hari	40,000	
	b. Makanan dan Minuman Tamu Wakil Bupati	Orang/Hari	40,000	
	c. Makanan dan Minuman Tamu Ketua DPRD	Orang/Hari	36,000	
	d. Makanan dan Minuman Tamu Wakil Ketua DPRD	Orang/Hari	36,000	
	10.2. Makanan dan Minuman Kegiatan (Pelatihan, Sosialisasi, Penyuluhan, dll)			
	a. Makan	Orang/Hari	40,000	
	b. Minum	Orang/Hari	15,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	10.3. Makanan dan Minuman Penjagaan Kantor/Rumah Dinas			
	a. Makan	Orang/Hari	30,000	
	b. Minum	Orang/Hari	10,000	
11	SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU	Pegawai/Tahun	1,600,000	
12	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN			
	12.1. Gedung Bertingkat	m ² /Tahun	187,000	
	12.2. Gedung Tidak Bertingkat	m ² /Tahun	130,000	
	12.3. Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m ² /Tahun	13,000	
13	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN			
	13.1. Ruang Besar 101-299 Peserta	Per Hari	5,000,000	
	13.2. Ruang Sedang 50-100 Peserta	Per Hari	1,500,000	
	13.3 Ruang Kecil 1-50 Peserta	Per Hari	750,000	
14	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN			
	14.1. Roda Empat	Per Hari	800,000	
	14.2. Roda Enam/Bus Sedang	Per Hari	1,500,000	
	14.3. Roda Enam/Bus Besar	Per Hari	2,000,000	
15	SATUAN BIAYA SEWA SOUND SYSTEM			
	15.1. Sound System Ruang	Per Hari	1,000,000	
	15.2. Sound System Lapangan Standar	Per Hari	2,500,000	
	15.3. Sound System Lapangan Lux	Per Hari	10,000,000	
16	SATUAN BIAYA SEWA GENERATOR	Per Hari	3,000,000	
17	SATUAN BIAYA SEWA TENDA	Per Hari	200,000	
	17.1. Tenda Biasa	Per Hari	400,000	
	17.2. Tenda Lux			
18	SATUAN BIAYA SEWA MEUBELER			
	17.1. Sewa Kursi	Per Hari	5,000	
	17.2. Sewa Sofa	Per Hari	500,000	
	17.3. Sewa Meja	Per Hari	250,000	
19	SATUAN BIAYA SEWA DEKORASI			
	19.1. Untuk Ruang Besar	Per Hari	1,500,000	
	19.2. Untuk Ruang Kecil	Per Hari	750,000	
20	SATUAN BIAYA PEMBUATAN SPANDUK	Per Meter	60,000	
21	SATUAN BIAYA SEWA PELIPUTAN MEDIA ELEKTRONIK	Per Hari	5,000,000	
22	SATUAN BIAYA SEWA PELIPUTAN MEDIA CETAK	Per Hari	500,000	
23	SATUAN BIAYA DOKUMENTASI	Per Paket	300,000	
24	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS			
	24.1. Pakaian Dinas Harian Lengkap	Stel	600,000	
	24.2. Pakaian Dinas Satpol PP Lengkap	Stel	600,000	
	24.3. Pakaian Hansip Lengkap	Stel	600,000	
	24.4. Pakaian Sipil Harian	Stel	900,000	
	24.5. Pakaian Sipil Resmi	Stel	1,200,000	
	24.6. Pakaian Sipil Lengkap	Stel	2,500,000	
	24.7. Pakaian Korpri	Stel	500,000	
	24.8. Pakaian Olah Raga	Stel	300,000	
	24.9. Pakaian Daerah	Stel	500,000	
	24.10. Pakaian Kerja Lapangan	Stel	900,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5
25	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DILUAR KANTOR	Orang/Kali	250,000	
	25.1. Pejabat Eselon II			
	a. Halfday		246,000	
	b. Fullday		340,000	
	c. Fullboard		815,000	
	25.2. Pejabat Eselon III kebawah			
	a. Halfday		150,000	
	b. Fullday		288,000	
	c. Fullboard		563,000	
26	SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS			
	26.1. Aceh	Orang/Kali	95,000	
	26.2. Sumatra Utara	Orang/Kali	232,000	
	26.3. Riau	Orang/Kali	70,000	
	26.4. Kepulauan Riau	Orang/Kali	96,000	
	26.5. Jambi	Orang/Kali	60,000	
	26.6. Sumatra Barat	Orang/Kali	151,000	
	26.7. Sumatra Selatan	Orang/Kali	90,000	
	26.8. Lampung	Orang/Kali	123,000	
	26.9. Bengkulu	Orang/Kali	80,000	
	26.10. Bangka Belitung	Orang/Kali	60,000	
	26.11. Banten	Orang/Kali	306,000	
	26.12. Jawa Barat	Orang/Kali	60,000	
	26.13. DKI Jakarta	Orang/Kali	170,000	
	26.14. Jawa Tengah	Orang/Kali	50,000	
	26.15. D. I. Yogyakarta	Orang/Kali	94,000	
	26.16. Jawa Timur	Orang/Kali	148,000	
	26.17. Bali	Orang/Kali	116,000	
	26.18. Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	213,000	
	26.19. Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	72,000	
	26.20. Kalimantan Barat	Orang/Kali	107,000	
	26.21. Kalimantan Tengah	Orang/Kali	80,000	
	26.22. Kalimantan Selatan	Orang/Kali	97,000	
	26.23. Kalimantan Timur	Orang/Kali	353,000	
	26.24. Kalimantan Utara	Orang/Kali	353,000	
	26.25. Sulawesi Utara	Orang/Kali	110,000	
	26.26. Gorontalo	Orang/Kali	115,000	
	26.27. Sulawesi Barat	Orang/Kali	217,000	
	26.28. Sulawesi Selatan	Orang/Kali	128,000	
	26.29. Sulawesi Tengah	Orang/Kali	60,000	
	26.30. Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	131,000	
	26.31. Maluku	Orang/Kali	200,000	
	26.32. Maluku Utara	Orang/Kali	174,000	
	26.33. Papua	Orang/Kali	354,000	
	26.34. Papua Barat	Orang/Kali	130,000	


 KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,
 ABDULLAH VANATH

PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. Satuan Biaya Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota

Uang transport dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi.

Uang transport kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan yang bersifat rutin.

Uang transport kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.

2. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural

Satuan biaya diklat Pimpinan/Struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

3. Satuan Biaya Latihan Prajabatan

Satuan Biaya Latihan Prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

4. Satuan Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Satuan Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bagi pejabat/pegawai negeri/pegawai tidak tetap yang akan mengikuti bimbingan teknis dan atau pendidikan dan pelatihan aparatur yang dapat dibiayai adalah bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Tidak diperkenankan menggunakan biaya ini untuk mengikuti bimbingan teknis dan atau pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga lain selain instansi pemerintah.

5. Satuan Biaya Perawatan dan Kendaraan Bermotor

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan bermotor digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan biaya bahan bakar minyak.

6. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *Personal Computer/Notebook*, Printer, AC Split dan Genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan Genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

7. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non-Gelar

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non-gelar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non-gelar bagi pegawai yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III,

Diploma IV atau Strata 1 (satu) dan pendidikan Pasca Sarjana Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga) yang terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional

8. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan, diberikan kepada pasien rumah sakit.

9. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran merupakan satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal.

10. Satuan Biaya Makan dan Minum

Satuan biaya makan dan minum rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan dan minuman termasuk minuman dan kudapan untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat eselon II/setara maupun untuk rapat biaya yang diselenggarakan di kantor.

Rapat koordinasi tingkat eselon II/setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya adalah eselon II/pejabat yang setara.

11. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/Atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru

Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/Atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai dan minimal untuk 1 (satu) pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

12. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan

Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

13. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan diluar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dan sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

14. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam) untuk kegiatan yang sifatnya insidental dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sesudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

Satuan biaya sewa kendaraan dapat diperuntukan bagi pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati) yang melakukan perjalanan dinas dan memerlukan sewa kendaraan dan diberikan secara *at cost*.

15. Satuan Biaya Sewa Sound Sistem

Satuan biaya sewa sound sistem merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa sound sistem yang terdiri dari sound system ruangan,

sound sistem lapangan standar dan sound sistem lapangan lux untuk menunjang pelaksanaan kegiatan rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lain yang sejenis.

16. Satuan Biaya Sewa Generator

Satuan biaya sewa generator merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa generator untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor, sudah termasuk bahan bakar minyak.

17. Satuan Biaya Sewa Tenda

Satuan biaya sewa tenda merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa tenda yang terdiri dari tenda biasa dan tenda lux untuk pelaksanaan kegiatan diluar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lain yang sejenis.

18. Satuan Biaya Sewa Meubeler

Satuan biaya sewa meubeler merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa meubeler yang terdiri dari kursi, sofa dan meja untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lain yang sejenis.

19. Satuan Biaya Sewa Dekorasi

Satuan biaya sewa dekorasi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan sewa dekorasi untuk kegiatan pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lain yang sejenis.

20. Satuan Biaya Pembuatan Spanduk

Satuan biaya pembuatan spanduk digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembuatan spanduk dihitung dalam satuan luas.

21. Satuan Biaya Sewa Peliputan Media Elektronik

Satuan biaya sewa peliputan media elektronik merupakan perencanaan kebutuhan biaya sewa peliputan media elektronik misalnya radio dan televisi.

22. Satuan Biaya Sewa Peliputan Media Cetak

Satuan biaya sewa peliputan media cetak merupakan perencanaan kebutuhan biaya sewa peliputan media cetak misalnya surat kabar/harian/tabloid/bulletin.

23. Satuan Biaya Dokumentasi

Satuan biaya dokumentasi digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan dan pencetakan dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto/gambar, belum termasuk biaya bingkai foto.

24. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya meliputi :

a. **Satuan Biaya Pakaian Dinas Harian Lengkap.**

Satuan biaya pakaian dinas harian lengkap diperuntukan bagi pegawai yang penyediaannya secara selektif dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

b. **Satuan Biaya Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Lengkap**

Satuan biaya pakaian dinas satuan polisi pamong praja lengkap diperuntukan bagi satuan polisi pamong praja, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

- c. Satuan Biaya Pakaian Hansip Lengkap
Satuan biaya pakaian hansip harian lengkap diperuntukan bagi pegawai yang penyediaannya diberikan 1 (satu) stel per tahun.
- d. Satuan Biaya Pakaian Sipil Harian
Satuan biaya pakaian sipil harian diperuntukan bagi pegawai yang penyediaannya diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.
- e. Satuan Biaya Pakaian Sipil Resmi
Satuan biaya pakaian sipil resmi diperuntukan bagi pegawai yang penyediaannya secara selektif dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.
- f. Satuan Biaya Pakaian Sipil Lengkap
Satuan biaya pakaian sipil lengkap diperuntukan bagi pegawai yang penyediaannya secara selektif dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.
- g. Satuan Biaya Pakaian Korpri
Satuan biaya pakaian korpri diperuntukan bagi pegawai yang penyediaannya diberikan 1 (satu) stel per tahun.
- h. Satuan Biaya Pakaian Olah Raga
Satuan biaya pakaian olah raga diperuntukan bagi pegawai yang penyediaannya diberikan 1 (satu) stel per tahun.
- i. Satuan Biaya Pakaian Daerah
Satuan biaya pakaian daerah diperuntukan bagi pegawai yang penyediaannya secara selektif dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

25. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut peserta kegiatan terbagi dalam 2 (dua) jenis :

- a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon II yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) pejabat eselon II.
- b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) pejabat eselon III.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis :

- a. Paket Fullboard
Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket mencakup minuman datang, akomodasi 1 malam, makan 3 (tiga) kali sehari, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk screen proyektor, podium, flip chart, white board, standar sound system, alat tulis, air mineral dan permen)
- b. Paket Fullday
Satuan biaya paket fullday disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali ruang pertemuan (termasuk screen proyektor, podium, flip chart, white board, standar sound system, alat tulis, air mineral dan permen)
- c. Paket Halfday
Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah hari minimal 5 (lima) jam. Komponen biaya mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali (siang), rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk screen proyektor, podium, flip chart, white board, standar sound system, alat tulis, air mineral dan permen)

Catatan :

- a. Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh pejabat Negara/pegawai dapat menggunakan hotel yang sama disesuaikan dengan kelas kamar hotel yang ditetapkan untuk setiap pejabat Negara/pegawai negeri.
- b. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut :
Pejabat eselon II = 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang
Pejabat eselon III ke bawah = 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang
- c. Kegiatan yang diselenggarakan secara fullboard dapat dilaksanakan, baik di dalam kota maupun di luar kota.
 1. Kegiatan yang diselenggarakan di luar kota, alokasi pada RKA-SKPD terdiri atas : biaya transportasi yang diberikan secara at cost, indeks paket pertemuan fullboard, dan uang harian paket fullboard diluar kota (lampiran II nomor 25)
 2. Pada kegiatan yang diselenggarakan didalam kota, alokasi pada RKA-SKPD terdiri atas : indeks paket pertemuan (fullboard/fullday/halfday), uang saku dan biaya transportasi dalam kota.
- d. Besaran uang saku untuk kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran nomor 28 yang merupakan bagiab tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- e. Kegiatan rapat/pertemuan luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara insentif harus menggunakan indeks satuan biaya tersebut diatas.

26. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas

Satuan biaya taksi perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Catatan :

- a. Indeks tarif taksi di Provinsi Kalimantan Timur dihitung dari Bandara Sepinggan (Balikpapan) sampai dengan Kota Samarinda.
- b. Contoh perhitungan alokasi biaya taksi
Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Bula ke Jakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut :
 1. Berangkat :
 - a. Biaya taksi dari Pelabuhan Tulehu dan atau Dermaga Penyebrangan Hunimua ke Bandara Pattimura Laha; dan
 - b. Biaya taksi dari Bandara Soekarno Hatta (Jakarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta.
 2. Berangkat :
 - a. Biaya taksi dari hotel/penginapan (Jakarta) ke Bandara Soekarno Hatta; dan
 - b. Biaya taksi dari Bandara Pattimura Laha ke tempat Pelabuhan Tulehu dan atau Dermaga Penyebrangan Hunimua.

27. Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Pergi – Pulang (PP) dari Kota Bula

Biaya transportasi perjalanan dinas dapat diberikan kepada pejabat Negara/pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan kegiatan pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi.

Uang transport perjalanan dinas tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan dinas yang bersifat rutin.

Uang transport perjalanan dinas dalam kabupaten tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.

Catatan :


- a. Untuk kegiatan dalam kabupaten tidak yang mengharuskan menggunakan mode transportasi udara dan atau laut maupun memerlukan biaya yang melebihi biaya yang ditetapkan dapat diberikan secara at cost.
- b. Biaya transportasi dalam kota untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenis dapat dibebankan pada anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan.


Catatan umum :

1. SKPD dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut :
 - a. Pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas;
 - b. Pembatasan dan pengendalian biaya rapat diluar kantor;
 - c. Penerapan sewa kendaraan operasional sebagai salah satu alternative penyediaan kendaraan operasional.
2. Satuan biaya yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini sudah termasuk pajak.

Pengertian istilah :

- | | |
|---------|---------------------|
| a. OJ | : Orang / Jam |
| b. OH | : Orang / Hari |
| c. OB | : Orang / Bulan |
| d. OT | : Orang / Tahun |
| e. OP | : Orang / Paket |
| f. OK | : Orang / Kegiatan |
| g. OR | : Orang / Responden |
| h. Oter | : Orang / Terbitan |

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, 


ABDULLAH VANATH
